



---

**DONALD TRUMP, KEBIJAKAN PEMBATAHAN IMIGRAN MUSLIM,  
DAN ISLAMOPHOBIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH  
DEMOKRASI AMERIKA SERIKAT**

<https://doi.org/10.53649/contemplate.v4i1.234>

**Ali Yansah<sup>1)</sup>, Harpan Reski Mulia<sup>2)</sup>**

<sup>1,2</sup>Mahasiswa Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora,  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.  
E-mail: <sup>1</sup>[ali.yansah22@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:ali.yansah22@mhs.uinjkt.ac.id), [harpanreskimulia@gmail.com](mailto:harpanreskimulia@gmail.com)

**Abstract**

*The United States is known not only for its strength in controlling economic aspects but also as a democratic country. History records American democracy as a historic achievement. However, since becoming the president of the United States in 2017, Donald Trump had a significant impact on democracy. His policies against Muslim immigrants were later assessed by observers as illegal and tarnishing the history of United States democracy. This paper explores the broad picture of Donald Trump's policies, how observers responded, and what impact it had on the history of United States democracy. Using the chronological-thematic historical method, the study found that many internal circles in the United States responded, such as Harvard Law School students who compared it with the provisions of the United States. The history of democracy in the United States is not appropriate as a fulcrum for the cause of Donald Trump's policy of eradicating Muslim Immigrants.*

**Keyword:** *United States, Donald Trump, Islamophobia, History, Democracy*



---

### Abstrak

Amerika Serikat, selain faktor kekuatannya yang dapat menguasai aspek perekonomian, negara ini juga dikenal dengan negara demokrasi. Sejarah mencatat bahwa demokrasi amerikat secara kenegaraan merupakan sebuah hal yang cukup berusia. Namun Donald Trump, semenjak menjadi presiden Amerika Serikat pada tahun 2017 cukup memberikan dampak lain terhadap hal ini. Kebijakannya terhadap Imigran Muslim yang kemudian oleh para pengamat dinilai melanggar perundangan dan mencoreng sejarah demokrasi Amerika Serikat. Tulisan ini akan mencoba menelusuri tentang apa yang terjadi dalam gambaran luas kebijakan Donald Trump ini, Bagaimana tanggapan para pengamat, dan Bagaimana jika kebijakan ini dilihat dari sejarah demokrasi Amerika Serikat dari masa ke masanya. Dengan metode sejarah kronologis-tematis, hasilnya ditemukan bahwa, dari kalangan internal Amerika Serikat pun banyak pengamat yang menentang, seperti yang dilakukan oleh mahasiswa Harvard Law School yang membandingkan dengan perundangan Amerika Serikat. Sejarah demokrasi Amerika Serikat pun juga tidak tepat dijadikan sebagai titik tumpu adanya kebijakan Donald Trump tentang pembatasan Imigran Muslim.

**Kata kunci:** Amerika Serikat, Donald Trump, Islamophobia, Sejarah, Demokrasi.



## A. PENDAHULUAN

Negara memiliki peran penting sebagai produsen hukum bagi penduduknya. Mengatur dan menjaga kestabilan penduduk sebuah negara adalah hal penting. Ada banyak cara untuk menjaga kestabilan ini, salah satunya adalah mengeluarkan kebijakan baru jika dirasa terdapat hal yang akan mengganggu kestabilan sebuah negara. Negara dalam kewajibannya jauh lebih besar daripada subyek hukum internasional setelah negara. Negara harus memperhatikan penduduknya karena pada dasarnya negara adalah satu kesatuan dari penduduk yang menetap, wilayah definitive, pemerintah yang berdaulat serta kapasitas untuk memiliki hubungan dengan negara yang lain entah yang berada di sekitarnya maupun yang berada jauh darinya. Kriteria ini pada dasarnya telah dibahas dalam Konvensi Montevideo pada tahun 1933 yang tentunya dengan berbagai persyaratan kenegaraan dengan cermin hukum dalam kebiasaan nasional. Negara dengan kekuatannya diharapkan menjadi payung yang dapat memberikan perlindungan serta memberikan hak dan kewajiban terhadap penduduknya adalah hal yang niscaya. Akhir-akhir ini Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang dikira kurang memperhatikan penduduknya.

Amerika Serikat adalah negara berpengaruh di Dunia, keuangan dunia yang dikendalikan atas pacuan Dollar sebagai titik tumpu inflasi keuangan maka tidak salah juga jika dikatakan bahwa Amerika Serikat sebagai cermin perekonomian dunia. Amerika Serikat dengan perjalanan sejarahnya yang panjang menyimpan berbagai permasalahan kontroversi di dalamnya. Baru-baru ini dalam ajang pemilihan Presiden Amerika Serikat yang ke-45, Donald Trump berhasil memenangkan suara atas saingannya Hillary Clinton pada tahun 2016, seperti halnya pemilihan Presiden di negara-negara lain, pada masa kemenangan Donald Trump pun banyak sekali kontroversinya.

Pada masa jabatannya, Presiden Donald Trump banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Tidak ada masalah lebih dalam banyak kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump sampai pada akhirnya Donald Trump mengeleuarkan kebijakan Migrant Protection Protocol pada tahun 2019. Dimana kebijakan ini dinilai melanggar HAM oleh para pengamat dunia. Sehingga menimbulkan spekulasi-spekulasi yang “frontal” dalam memandang Amerika Serikat dalam kepemimpinan Donald Trump.



Terdapat banyak sekali artikel yang telah ditulis oleh banyak peneliti di dunia tentang kasus Donald Trump bersama kebijakannya tentang Imigran muslim di Amerika Serikat. Berbagai perspektif pendekatan seperti antropologi, sosiologi, budaya sampai politik telah dipaparkan. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba memaparkan kasus ini dalam perspektif sejarah. Dengan Amerika yang telah menginjak umur dua abad lebih tentu menyimpan serangkaian hukum dan jejak revolusinya. Penelitian ini akan melihat sejarah Amerika yang kemudian akan dikomparasikan dengan kebijakan Donald Trump.

Tulisan ini akan berusaha memaparkan kebijakan-kebijakan tersebut. Tulisan ini akan menjabarkan Apa latar belakang munculnya kebijakan Donald Trump tersebut jika dilihat dari perspektif sejarah demokrasi dan keadaan Amerika Serikat pada saat itu. Bagaimana konteks masa penyampaian kebijakan Donald Trump di Amerika Serikat. Apa pengaruh kebijakan tersebut baik dalam tubuh Amerika Serikat sendiri maupun dunia pada umumnya. Dalam penulisan ini penulis mencoba mengungkapkan apakah “kebijakan” yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat melalui Presiden Donald Trump adalah dampak dari sejarah demokrasi Amerika Serikat sendiri.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode naratif deskriptif. Melalui sumber-sumber pendukung seperti artikel yang didapatkan penulis dari jurnal-jurnal, kemudian dibentuklah sebuah kerangka pemikiran bagaimana sesuatu dapat terjadi. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana Donald Trump dengan kebijakannya sebagai Presiden Amerika Serikat memberikan dampak besar terhadap negara yang dipimpinnya. Teknik pengumpulan yang dipakai adalah dengan cara penelaahan terhadap literature-literatur seperti buku, dan artikel. Data yang didapat dari penelaahan sumber seperti jurnal dan buku pun penulis jabarkan sehingga dapat terurai lebih baik apa tujuan dari penulisan ini. Metodologi dalam penyajian sejarah Amerika Serikat disini akan diuraikan dalam bentuk Kronologis-Tematis-Historis. Dimana suatu bentuk penulisan atau karangan, tidak termasuk dalam penulisan sejarah jika tidak mengedepankan aspek kronologis, angka tahun dan abad perlu diperhatikan.(Dien Madjid, 2021, p. 116)



---

## C. HASIL DAN ANALISIS

### **Biografi Donald Trump**

Biografi adalah sejarah, sama halnya dengan sejarah kota, negara, atau bangsa. (Kuntowijoyo, 2003, pp. 203–209) Dalam hal ini akan ditulis bagaimana sejarah seseorang semasa hidupnya. Donald Trump dengan nama lengkapnya Donald John Trump. Donald Trump lahir pada tanggal 14 Juni 1946 di New York, AS. Donald Trump adalah Presiden Amerika Serikat ke-45 dari 2017 hingga 2021 dan saat ini digantikan oleh Joe Biden. Donald Trump adalah anak keempat. Adapun beberapa tempat Donald Trump melanjutkan pendidikannya sebagai berikut:

1. Akademi Militer New York. Trump kuliah di Akademi Militer New York dari tahun 1959 hingga 1964.
2. Universitas Fordham di Bronx, New York, dari tahun 1964 hingga 1966.
3. Donald Trump kemudian melanjutkan studinya dari tahun 1966 hingga 1968 di Wharton School of Finance and Business.
4. University of Pennsylvania, di mana dia kemudian memperoleh gelar sarjana ekonomi. (Kuntowijoyo, 2003, p. 203)

Ketika Perang Vietnam pecah pada tahun 1968, Donald Trump diperiksa sampai kemudian memenuhi syarat untuk pembebasan medis dari dinas militer. Setelah lulus, Trump bekerja di salah satu bisnis orang tuanya dan menyimpan properti sewaannya antara 10.000 dan 22.000 unit. Kemudian, pada tahun 1974, Donald Trump menjadi presiden dari keluarga perusahaan dan kemitraan Trump Organization. Selama tahun 1960an dan 1970an, pembangunan perumahan Trump di New York, Norfolk, Ohio, Cincinnati, dan Virginia menjadi sasaran banyak ketidakadilan rasial terhadap orang Afrika-Amerika dan minoritas lainnya. Pada akhir 1970an hingga 1980an, Donald Trump memperluas bisnis orang tuanya dengan berinvestasi di beberapa resor dan real estat terbaik dan memperluas jejak geografisnya ke Manhattan dan Atlantic City, New Jersey. Pada Juni 2015, Donald Trump mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden Partai Republik, sehingga pada Mei 2016, saingan mereka dari Partai Republik menangguhkan kampanye mereka. Pada Juli 2016, Trump ditunjuk sebagai Ketua Konvensi Negara Republik 2016. Kampanye

Presiden Donald Trump menerima berita dan minat yang luas di berbagai media nasional dan internasional, banyak pertanyaan Trump dalam wawancara, Twitter, dan kegiatan kampanye disambut dengan kekacauan. atau terbukti salah Terbukti, beberapa kegiatan kampanye Donald Trump disertai dengan protes selama pemilihan pendahuluan di mana Trump akhirnya menjadi presiden dan mengalahkan Demokrat Hillary Clinton pada 2016. Presiden Donald Trump dilantik pada 20 Januari 2017. Pada usia 70, Trump adalah presiden AS tertua.(Heni Nurraihana, 2022, p. 15)

Kekuatan kepemimpinan Donald Trump terletak pada pengambilan keputusan yang sangat baik dengan resiko yang besar, seperti yang tercermin dari gaya bicaranya. Donald Trump bersifat konservatif, ia juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga dapat memimpin orang lain secara efektif, dan Donald Trump memiliki sikap kepemimpinan yang dominan, kuat, dan agresif. Keunggulan gaya kepemimpinan Donald Trump adalah bahwa kebijakannya telah menyebabkan pasar dunia bergerak ke dua arah yang berbeda. Pasar negara berkembang dan pasar negara maju berjalan dalam dua arah yang berbeda. Negara berkembang berada dalam kondisi lemah sedangkan negara maju Amerika Serikat berada dalam kondisi kuat.(Buzan & Little, 1994, p. 216)

### **Amerika Serikat dan Sejarah Demokrasinya**

Jika dilihat secara geografis, letak Amerika Serikat berada pada belahan bumi utara serta barat, yang secara tidak langsung sangat menentukan bagaimana iklim Amerika Serikat itu sendiri. Pada gambarannya, Amerika Serikat dapat dilihat dalam peta sebagai berikut.





---

Amerika Serikat secara kenegaraan berdiri sejak tanggal 4 Juli 1776. Konflik yang berakhir pada perang penuh yang dimulai pada bulan April 1775. Kemudian setelah melalui Revolusi Amerika, koloni-koloni yang ada menyatakan kemerdekaan dari Kerajaan Britania Raya dan kemudian mendirikan Amerika Serikat.

Teori, institusi, dan praktik demokrasi dalam kehidupan Barat selalu merupakan hasil interaksi antara tradisi yang tidak demokratis dan anti-demokrasi dengan tradisi demokrasi yang ada dan konsep-konsep baru di bidang sosial kemanusiaan, agama, kebutuhan politik, dan hak-hak politik. Fakta bahwa gagasan kedaulatan rakyat berbenturan dengan konsep kerajaan teosentris dan struktur kekaisaran gereja Roma yang semakin kaku tidak menghalangi orang Kristen untuk menciptakan sistem demokrasi di Eropa Barat dan Amerika Utara.

Elit penguasa dari sebagian tradisi besar peradaban memiliki keberatan tertentu terhadap demokrasi. Namun, dari perspektif sejarah dunia, dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat dunia dapat menggunakan tradisi lokal dalam membangun demokrasi modern. Jelas bahwa gagasan dan praktik demokrasi tidak asing bagi dunia. Di seluruh dunia, tradisi demokrasi lokal ini cenderung didasarkan pada konsensus daripada keputusan mayoritas dan seringkali disamakan dengan unit sosial yang relatif kecil. Pada saat yang sama, ada beberapa konsep dan gambaran yang sangat penting dalam bahasa Islam sepanjang sejarah, yang membentuk pemahaman Islam tentang demokrasi. Selain dinamisme dan keragaman opini politik Islam, terdapat konsep inti yang sangat sentral dalam opini politik seluruh umat Islam. Keragaman ini menyangkut perbedaan definisi istilah, bukan pengakuan istilah itu sendiri. Abu Al-A'la Al-Maududi - seorang pemikir Sunni terkemuka yang tinggal di India selama pendudukan Inggris dan kemudian menetap di Pakistan, dan pendiri organisasi kebangkitan Islam Asia Selatan menyatakan bahwa sistem politik Islam harus didasarkan pada tiga prinsip, yaitu Tauhid (Keesaan Tuhan), Traktat (Nabi) dan Khilafah (Khilafah). Sulit untuk memahami berbagai aspek pemerintahan Islam tanpa memahami sepenuhnya ketiga prinsip ini. Pemimpin Muslim lainnya mungkin mengungkapkan masalah ini dengan cara yang berbeda, namun ketiga konsep inti ini dapat memberikan dasar untuk memahami perspektif politik Muslim. Mengingat rekonseptualisasi konsep-konsep inti tersebut dalam konteks kekinian dapat



---

memberikan landasan penting untuk memahami landasan konseptual demokratisasi di dunia Islam.(Abd. Rahman Mustafa, 2013, p. 108)

Dalam bukunya *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century* (1995), Samuel P. Huntington menggambarkan posisi Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memulai gelombang demokratisasi sekitar tahun 1828 dan tergolong gelombang pertama. Huntington melihat demokrasi berkembang dengan sempurna di Amerika Serikat. Gelombang balik, kebalikan dari gelombang demokratisasi yang digambarkannya, tidak menyapu Amerika Serikat, meskipun banyak peristiwa menunjukkan kecenderungan demokrasi menyusut dan mundur ketika tidak bisa dikatakan terancam di Amerika Serikat seperti pelecehan yang dialami orang Amerika kulit hitam dan putih dalam hidup mereka.

Presentasi oleh Herbert McClosky dan John Zaller di *The American Ethos: Public Attitudes to Capitalism and Democracy* (1988) menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi sangat mempengaruhi arah dan sifat pembangunan bangsa Amerika dan tetap berfungsi sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman politik Amerika. Pada saat yang sama, *Waves of Democracy, Social Movements and Political Change* oleh John Markoff (1996) melihat pertumbuhan institusi demokrasi dan penyebaran gagasan demokrasi di Amerika Serikat.

Menurut Charles W. Kegley dan Eugene R. Witkopf dalam buku mereka *American Foreign Policy: Pattern and Process* (1996) meneliti bahwa proses kebijakan luar negeri Amerika terutama dilakukan dan dipengaruhi oleh aktor-aktor tertentu dalam badan-badan politik dan pemerintahan Amerika, seperti Presiden, Kongres, dan kelompok-kelompok tertentu, tanpa mencermati peran masyarakat dalam Amerika Serikat. umum dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dan sejauh mana pengaruh pragmatis-realis pada implementasi politik. Mengingat betapa luasnya praktik dan kehidupan demokrasi di Amerika Serikat, orang cenderung percaya bahwa demokrasi pertama kali lahir di Amerika Serikat, meskipun Amerika Serikat memperkenalkan demokrasi dan Revolusi yang dilakukan untuk pembentukan demokrasi dan demokrasi baru di abad ke-18.(John L Esposito, John O. Voll, 2016, p. 100)

Dalam perjalanan sejarah demokrasi Amerika Serikat secara kenegaraan seperti yang telah diuraikan di atas maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hal yang



---

menyebabkan munculnya Donald Trump di Amerika Serikat. Kestabilan demokrasi yang dijaga negara pun pada akhirnya mengusung negara Amerika Serikat sampai pada masa pemerintahan Donald Trump.

### **Islamophobia di Amerika Serikat**

Mengikuti etimologi Islamophobia, dari kata Islam & *Phobia*. Menurut *College Dictionary*, *phobia* adalah ketakutan yang tidak terkait yang tidak memiliki arti atau masuk akal bagi suatu objek, perilaku, atau peristiwa tertentu yang mendorong orang untuk menghindari atau takut pada suatu situasi. Dengan penjelasan tersebut, Islamophobia dapat diartikan sebagai ketakutan yang tidak rasional terhadap agama Islam, sehingga aktivitas yang bernuansa Islami harus dihilangkan. Allen juga memberikan definisi; dalam setiap pemikiran, pemikiran, dan tindakan yang mengabaikan umat Islam tentang status dan hak asasinya, dimungkinkan sebagian masyarakat didasarkan pada keyakinan Islam. Segala aktivitas warga muslim dan perlakuan fisik dan mentalnya selalu dan terutama dilihat sebagai ekspresi perilaku masyarakat muslim secara keseluruhan dan mereka tidak percaya pada manipulasi individu.

Islamophobia dapat diasumsikan pada dua level, yaitu level institusional dan level individu. Secara institusional, Islamophobia diwujudkan dalam kebijakan aparat penegak hukum dalam melakukan patroli individu dan kelompok warga muslim, baik di lingkungan kampus maupun lingkungan. Intervensi intelijen FBI terhadap individu, keluarga, dan organisasi Muslim yang terkait dengan kelompok teroris asing, penuntutan inkonstitusional terhadap tersangka teroris, pelacakan arus individu dan kelompok warga Muslim, dan penggambaran media yang bias secara masif dan terstruktur di tingkat nasional tingkat. Pada saat yang sama, individu warga Muslim juga mengalami intoleransi, mulai dari pelecehan agama hingga tindakan kriminal seperti perusakan tempat ibadah oleh warga Muslim dan senjata api mematikan. (Zulian, 2020, p. 144)

Aktivis yang menentang pembangunan masjid dieksekusi oleh kelompok sayap kanan, dan penolakan ini juga mendapat tentangan dari kelompok sayap kiri dan Demokrat liberal di Amerika Serikat. Bagi kelompok liberal, setiap warga negara Amerika, termasuk warga Muslim, berhak membangun dan membangun tempat ibadahnya. Padahal,



---

membangun masjid di tempat sensitif ini merupakan kekuatan nilai dan prinsip hidup Amerika. Cara terbaik untuk melawan intoleransi dan ketidakdewasaan dalam kehidupan beragama harus dilakukan di wilayah yang dianggap kontroversial. Pengalaman terkenal dari negara-negara Eropa, Amerika, Kanada, India, Turki dan Afrika Selatan menegaskan fakta yang tak terbantahkan bahwa Islamofobia atau anti-Islamisme, jauh dari latihan intelektual abstrak, adalah realitas kontemporer. Studi terbaru menunjukkan penyebaran ideologi kebencian yang meluas ini, yang mengarah pada serangan terhadap umat Islam di berbagai lapisan masyarakat di Barat. (Zulian, 2020, pp. 145–147)

Terkait kondisi masyarakat Muslim di Amerika Serikat. Perbedaan antara imigran Muslim dan warga negara Amerika Serikat pada umumnya disebabkan oleh perbedaan peradaban antara Muslim dan Barat. Dari lanskap Agama Amerika, perhatikan bahwa perbedaan identitas karena agama terbukti penting. Mayoritas penduduk Amerika Serikat adalah Kristen (72%), sedangkan penduduknya adalah Muslim (0.6%), yang merupakan salah satu faktor penyebab keterlambatan integrasi. Pendirian agama ini menciptakan konsekuensi sosial, politik dan ekonomi yang kompleks. Misalnya, setiap hari, setiap Muslim harus shalat lima waktu, yang dianggap aneh bagi warga Amerika Serikat karena kelangsungan pekerjaan. Demikian pula dengan larangan, makanan seperti daging berlabel halal, minuman beralkohol Khomr, serta pergaulan bebas tidak menjadi masalah bagi warga Amerika Serikat non-Muslim. Nilai-nilai agama dalam keluarga dan masyarakat kemudian tidak menjadi halangan. Umat Islam menganggap ikatan keluarga dan pernikahan adalah suci dan mengikat keluarga Muslim. Ini tidak berlaku untuk keluarga Amerika Serikat non-Muslim. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman bahwa bagi umat Islam, hak aqidah dan ibadahnya harus diutamakan. (Al Wekhian, 2015, p. 94)

### **Kebijakan Donald Trump**

Pada 4 Februari 2018, Donald Trump memiliki total 60.000 visa setelah kebijakan pengeluaran Trump diterapkan di 7 negara atas perintah eksekutif Trump. Di bawah visa yang dicabut, visa cuti pemerintah tersedia bagi orang yang ingin memasuki Amerika Serikat, tetapi visa ini dapat dipulihkan tanpa perlu mengajukan izin baru. Dalam 90 hari, aplikasi visa AS menjalani penyaringan ketat untuk imigran Muslim. Iran, Irak, Libya,



Suriah, Somalia, Sudan dan Yaman, dan semua pengungsi selama tiga bulan atau 120 hari, negara-negara ini dikirim ke Amerika Serikat. Kebijakan ini berlaku mulai 30 Juni, sehingga akan ada lebih banyak pengungsi dalam 120 hari ke depan. Warga negara yang dianggap Muslim diperbolehkan masuk ke Amerika Serikat, yaitu Irak, Iran, Somalia, Libya, Suriah, Sudan, dan Yaman. Masuk tujuh negara bagian ke Amerika Serikat dibatasi hingga 90 hari dari masa berlaku visa. Dalam hal ini, mungkin Donald Trump benar, penangguhan dan embargonya harus didukung oleh Amerika Serikat, namun, banyak orang menentang kebijakan periklanan Donald Trump yang diskriminatif dan anti-Islam. Kebijakan Donald Trump diumumkan pada Maret 2017 di Washington, dari enam negara tanpa ikatan keluarga dan bisnis ke Amerika Serikat tidak dapat mengajukan visa. (Langenbacher & Wittlinger, 2018, p. 178)

Dalam hal lain, pemenuhan janji-janji kampanye terkait undang-undang imigrasi Donald Trump sebelum menjadi presiden tetapkan hal yang harus ditepati, dalam rangka ini supaya janji-janji itu terpenuhi, langkah-langkah konkrit yang dituju adalah sebagai berikut:

1. Penundaan penerbitan visa terhadap negara-negara yang jika terjadi kelalaian pengidentifikasian *screening* tidak akan timbul suatu peristiwa apapun.
2. Mengimplementasikan sistem *screening* seragam keseluruhan program keimigrasian. Siapapun yang datang ke Amerika Serikat dapat menjamin rasa aman keselamatan dan keamanan nasional Amerika Serikat.
3. Penundaan program penerimaan pengungsi internasional selama 120 hari, untuk menentukan pengungsi internasional manakah yang jika diterima memiliki resiko kecil untuk kepentingan nasional di Amerika Serikat.
4. Melakukan pencatatan administrasi secara sempurna tentang sistem pengeluaran dan pemasukan biometric.
5. Untuk memperoleh visa, pelamar harus diwawancarai sebelum disetujui permohonannya.
6. Melakukan pengawasan terhadap keabsahan visa dalam periode tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku. (Goldstein & Hall, 2017)



---

## **Berbagai Pandangan Terhadap Kebijakan Donald Trump**

Kebijakan besar yang disampaikan Donald Trump dalam masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat memunculkan banyak kajian baik secara internal Amerika Serikat seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa Harvard Law School dan eksternal seperti yang dilakukan oleh Jawahir Thontowi.

Para mahasiswa Harvard Law School, Harvard University, dalam agenda *Harvard and Refugee Clinical Program*, terkait kebijakan Presiden Donald Trump tentang Executive Order, khususnya bagi pencari Suaka Politik telah melanggar ketentuan konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa jabatan poin pentingnya adalah: Pertama, melanggar penahanan pencari suaka politik, yang jelas-jelas melanggar kewajiban hukum internasional oleh pemerintah Amerika Serikat. Secara khusus, Pasal 31(2) Konvensi Pengungsi 1951: “*states that a country may restrict the movement of refugee only when necessary*”. Penahanan pencari suaka politik di bawah undang-undang imigrasi nasional jelas bertentangan dengan Pasal 31. Demikian pula pelanggaran terjadi karena pencari suaka politik sulit mempertanyakan pendapat pengacaranya. Sedangkan pada umumnya, jika mereka mampu mempertahankan diri, kemungkinan besar mereka akan dibebaskan. Kedua, pelanggaran karena perlakuan diskriminasi terhadap para pencari suaka politik dan pengungsi akibat berbeda agama dan asal usul kebangsaan. Tindakan diskriminatif tersebut jelas melanggar ketentuan hukum nasional dan internasional. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, merupakan hak yang wajib diutamakan dalam konstitusi suatu negara. Termasuk kedudukan para pengungsi, atau imigran Muslim dari Timur Tengah atau manapun untuk diperlakukan sama di Amerika Serikat. Ketiga, pelanggaran oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap imigran Muslim karena mendeportasi dan mengembalikan pengungsi atau pencari suaka politik tanpa hak banding. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Konvensi UNHCR 1951, serta Pasal 26 ICCPR, Pasal 24 Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika Serikat dan pasal 2 ayat (2) ICESCR. Keempat, pelanggaran pemulangan pencari suaka politik ke Meksiko, negara asalnya, sebenarnya bertentangan dengan prinsip non-repudiation. Prinsip ini diatur dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951, sebagai berikut: “*No contracting State shall expel or return (refouler) a refugee in any manner whatsoever to the frontier of territories where his*

---

**Ali Yansyah dan Harpan Reski Mulia:** *Donald Trump, Kebijakan Pembatasan Imigran Muslim, Dan Islamophobia Dalam Perspektif Sejarah Demokrasi Amerika Serikat*



---

*life or freedom would be threatened an account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.”(Goldstein & Hall, 2017)*

Di lain argumen, Konsep Syariah yang selama ini dipahami responden adalah terjadi karena *missunderstanding* atau miskonsepsi. Penyebutan konsep Syariah dipahami sebagai perbuatan yang menunjukkan kekerasan atau radikalisme. Perang atau jihad adalah tidak tepat. Hanya sebahagian benar jika rujukannya adalah opini yang dikembangkan Taliban di Afghanistan. Syariah identik dengan hukum *qishas* (hukuman mati), *qadfa* (hukuman zina), dan hukuman *tazir* lainnya. Padahal, konsep Syariah adalah jalan atau pedoman tentang seluruh aspek kehidupan manusia, di dalamnya mencakup aqidah (keyakinan), ibadah (menuju Allah SWT), *muamalah* (aspek sosial, ekonomi, politik dan pertahanan), dan *akhlaqul karimah* yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Bila mana kebijakan pelarangan terbatas pada kaum pendatang Muslim (*immigrant Muslim*), disebabkan oleh ancaman kaum Muslim yang mau menerapkan Syariat Islam, maka jelas Presiden Trump keliru dalam menggunakan argumentasi.

#### **D. KESIMPULAN**

Amerika Serikat terkenal kuat dalam hal demokrasi negara dalam peraturan kenegaraannya. Hal ini seperti yang tergambarkan dari sejarah demokrasi Amerika Serikat sendiri. Negara sebagai pelindung dari setiap penduduknya dari ancaman kesenjangan budaya, ras, agama dan hal-hal pengelompokan lainnya benar-benar teratur dalam perundang-undangan Amerika Serikat. Poin-poin kebijakan Donald Trump sendiri diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penundaan penerbitan visa terhadap negara-negara yang jika terjadi kelalaian pengidentifikasian *screening* tidak akan timbul suatu peristiwa apapun.
2. Mengimplementasikan sistem *screening* seragam keseluruhan program keimigrasian. Siapapun yang datang ke Amerika Serikat dapat menjamin rasa aman keselamatan dan keamanan nasional Amerika Serikat.



3. Penundaan program penerimaan pengungsi internasional selama 120 hari, untuk menentukan pengungsi internasional manakah yang jika diterima memiliki resiko kecil untuk kepentingan nasional di Amerika Serikat.
4. Melakukan pencatatan administrasi secara sempurna tentang sistem pengeluaran dan pemasukan biometric.
5. Untuk memperoleh visa, pelamar harus diwawancarai sebelum disetujui permohonannya.
6. Melakukan pengawasan terhadap keabsahan visa dalam periode tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kajian yang dilakukan oleh banyak peneliti pun ternyata mengungkapkan bahwa setelah munculnya kebijakan pembatasan imigran dari Donald Trump menyimpulkan bahwa penentangan terhadap kebijakannya pun banyak juga dipelopori oleh internal Amerika Serikat sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Mahasiswa Harvard dan Eksternal seperti yang dilakukan oleh salah satu peneliti Jawahir Thontowi.



---

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Mustafa. (2013). *Laporan dari Lapangan: Geliat Irak Menuju Era Pasca-Saddam*. Kompas.
- Al Wekhian, J. (2015). Acculturation Process of Arab-Muslim Immigrants in the United States. *Asian Culture and History*, 8(1), 89. <https://doi.org/10.5539/ach.v8n1p89>
- Buzan, B., & Little, R. (1994). The Idea of “International System”: Theory Meets History. *International Political Science Review / Revue Internationale de Science Politique*, 15(3), 231–255.
- Dien Madjid. (2021). *Metode Sejarah Teori dan Praktik*. Kencana.
- Goldstein, D. M., & Hall, K. (2017). Postelection surrealism and nostalgic racism in the hands of Donald Trump. *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, 7(1), 397–406. <https://doi.org/10.14318/hau7.1.026>
- Heni Nurraihana. (2022). Gaya Kepemimpinan dari Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- John L Esposito, John O. Voll. (2016). *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek Terjemahan*. Mizan.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana Yogya.
- Langenbacher, E., & Wittlinger, R. (2018). The End of Memory? German-American Relations under Donald Trump. *German Politics*, 27(2), 174–192. <https://doi.org/10.1080/09644008.2018.1429410>
- Zulian, I. (2020). ANALISIS PENGARUH ISLAMOPHOBIA TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI PEMERINTAHAN DONALD TRUMP.



---

*Jurnal PIR : Power in International Relations*, 3(2), Article 2.

<https://doi.org/10.22303/pir.3.2.2019.140-155>